

**EKSISTENSI DEWAN KEPHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM  
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU  
DI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Alfryni Halawa  
180710029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM  
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU  
DI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Alfryni Halawa  
180710029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfryni Halawa  
NPM : 180710029  
Fakultas : Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

### **EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “DUPLIKAT” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pustaka. Apabila naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan Undang-undangyang berlaku. Demikianlah surat saya ini buat, dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



**Alfryni Halawa**  
**180710029**

**EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM  
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU  
DI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Alfryni Halawa  
180710029**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 29 Juli 2022**



**Drs. Ukas, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam Undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menangani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, *money politic*, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa Eksistensi dan upaya DKPP telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi hanya perlu adanya ketegasan yang lebih tegas dan harus adanya pengawasan yang terkontrol kepada penyelenggara pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

**Kata Kunci:** Penegakan, Eksistensi, dan Kode Etik.

## **ABSTRACT**

*Problems regarding the existence of the Honorary Council for The Implementation of Elections in enforcing the ethics of holding elections in Indonesia, especially in the Riau Islands, almost often occur in the implementation of elections every year. Basically, the holding of elections has been regulated in the law on the implementation of elections. Especially in enforcing the code of ethics and code of conduct for the implementation of elections based on the General Election Law and the Law on guidelines for the code of conduct for the implementation of elections. However, in the application of its rules as a large institution for organizing elections, especially the DKPP, it is still lacking in handling cases that occur and there are still many violations of the code of ethics that still often occur. Violations are caused by things like identity fraud, money politics, and so on. In fact, the settlement given is still rigid and does not have a deterrent effect on perpetrators of violations of the code of ethics. Based on the results of the research, the author found that the existence and efforts of the DKPP have been in accordance with the applicable rules, but only need to have firmer firmness and there must be controlled supervision of election organizers. In this case, the author's purpose in researching this is to find out how the existence of the honorary council as an enforcement agency for the code of ethics and how the settlement efforts can be made. The research method carried out is a normative qualitative method, namely literature studies sourced from journals, books, scientific papers, and other official documents.*

**Keywords:** *Enforcement, Extension, and Code of Ethics.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kekuatan, berkat, rahmat, dan karuniaNya kepada Penulis, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Yang dimana merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi starta satu (S1) pada program studi ilmu hukum Universitas Putera Batam. Dalam hal ini juga, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan naskah skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyusunan kata, kalimat dan bahkan gaya bahasa yang disampaikan. Sehingga Penulis, sangat menerima kritik dan saran dengan senang hati. Pada penulisan naskah skripsi ini juga sangat terbatas dan tidak akan terwujud tanpa bantuan dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga, Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Ukas S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang selalu memberikan motivasi, masukan, ide-ide, dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
6. Kepada kedua orangtua saya dan seluruh saudara saya yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat yang luar biasa untuk saya menyelesaikan skripsi ini dan Keluarga besar Mami haezel selaku kedua orangtua saya juga yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 29 Juli 2022



Alfryni Halawa

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Kerangka Teoritis .....	12
2.1.1 Teori Penegakan Hukum .....	12
2.1.2 Eksistensi .....	15
2.1.3 Kode Etik .....	17
2.1.4 Pemilihan Umum .....	19
2.2 Tinjauan Yuridis .....	25
2.2.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum .....	25
2.2.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode etik Penyelenggaraan pemilu .....	27
2.3 Penelitian Terdahulu .....	30
2.4 Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Sifat Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penlitian .....	38
3.4 Sumber Data .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.....	41
4.1.2 Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.....	44



4.2	Pembahasan .....	50
4.2.1	Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.....	50
4.2.2	Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau .....	54
	<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
5.1	Kesimpulan .....	65
5.2	Saran .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
	<b>LAMPIRAN</b>	
	Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	
	Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Rekapitulasi Pengaduan pelanggaran.....	6
<b>Tabel 1.2</b> Rekapitulasi kategori pelanggaran .....	7